



# SERI MANUAL PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN PADA KPH

# SERI MANUAL

# PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN PADA KPH



Proyek II Forest Investment Program  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka desentralisasi pengurusan dan pengelolaan hutan sebagaimana mandat pada Undang-Undang Nomor 41 Tentang Kehutanan, seluruh kawasan hutan di Indonesia terbagi habis pengelolaannya di dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), baik pada Hutan Produksi oleh KPHP; Hutan Lindung oleh KPHL dan Hutan Konservasi oleh KPHK. Pengolaan hutan oleh KPH pada dasarnya merupakan pengurusan hutan di tingkat tapak yang dapat menjamin terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengolaan hutan secara lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui terwujudnya capaian atau target program pembangunan nasioanal dan daerah pada wilayah KPH.

Organisasi pengelola KPH di daerah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi KPH sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan. Tugas dan fungsi KPH, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK); Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, khususnya pada Pasal 40, dan Pasal 118 s.d. Pasal 123; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, khususnya pada Pasal 17, Pasal 18 s.d. Pasal 23.

Pembangunan dan operasionalisasi KPH pada dasarnya dilaksanakan dengan memperhatikan kapasitas dan kompetensi atas aspek penting antara lain aspek teknis, aspek manajerial, aspek organisasi dan aspek sumber daya manusia sehingga dapat beroperasi sesuai dengan tujuan. Penguatan KPH pada 4 (empat) aspek di atas, dilakukan agar KPH dapat beroperasi dan diimplementasikan di tingkat tapak. Penguatan kapasitas kompetensi teknis, salah satunya melalui penyiapan Manual/Pedoman Operasional KPH.

Dalam penyusunan Manual/Pedoman Operasional KPH dimaksud, dilaksanakan dengan memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, aspek pengetahuan dan aspek pengalaman *best practice management* yang pernah dilakukan untuk setiap tahapan pengelolaan hutan. Perpaduan aspek pengetahuan dan *best practice* tersebut menjadikan manual/pedoman

operasional dapat diimplementasikan di lapangan secara lebih praktis tanpa mengurangi kaidah-kaidah keilmuan.

Seri Buku Manual ini, disusun sebagai bahan keilmuan dalam memberi pengetahuan khususnya pengurusan hutan pada KPH di bidang Perencanaan dan Pengelolaan Hutan pada KPH. Penyusunan seri buku dimaksud, menitikberatkan pencapaian tujuan pengelolaan hutan secara lestari untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Undang-Undang serta *best practice* keberhasilan proses perencanaan dan pengelolaan hutan di tingkat tapak yang sudah pernah dilakukan.

Manual ini dapat digunakan bukan hanya oleh pengelola KPH tetapi juga para pihak yang berhubungan dengan KPH antara lain fasilitator, pembimbing teknis, pembina, pengawas, evaluator, koordinator, pengendali atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan dan implementasi kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam hal terdapat perubahan kewenangan, tugas dan fungsi (tusi) organisasi KPH sebagaimana Peraturan Undang-Undang Pasca UUCK, pelaksanaan manual ini di tingkat lapangan selanjutnya disesuaikan dengan kewenangan dan tusi KPH antara lain sebagai fasilitator, pembimbing teknis, pembina, pengawas, evaluator, koordinator, pengendali atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan dan implementasi kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga dengan mudah memahami setiap tahapan pelaksanaan secara rinci di lapangan. Dengan pengetahuan dan pemahaman

tersebut, pada akhirnya KPH diharapkan dapat memberikan penilaian dan rekomendasi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan teknis kepada para pihak.

Penyusunan Seri Manual Perencanaan dan Pengelolaan Hutan pada KPH ini, didukung oleh pendanaan *Proyek Forest Investment Program (FIP) II "Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project"*, dimana terdapat komponen program yang mendukung kegiatan Penyiapan Metodologi dan Panduan Teknis Untuk Perencanaan Managemen KPH Dalam Rangka Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas KPH.

## **B. Tujuan**

Buku Seri Manual ini disusun sebagai:

1. Bahan referensi dan acuan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Hutan pada KPH sehingga dapat memberikan pengetahuan bagi para pihak pengurus dan pengelola hutan, guna menjamin pengelolaan hutan lestari untuk kemakmuran rakyat.
2. Tujuan rinci dari masing-masing tema pada Seri Buku Manual ini akan disajikan pada masing-masing Manual.
3. Sebagai bagian dari pencapaian target Proyek II FIP dalam Penguatan Perundang-Undangan, Kebijakan dan Kapasitas Kelembagaan untuk Desentralisasi Pengelolaan Hutan.

### C. Ruang Lingkup

1. Pelaksanaan manual ini bukan merupakan mandatori, tetapi sebagai bahan pengetahuan pelaksanaan di lapangan terkait dengan perencanaan dan pengelolaan hutan pada sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pada saat KPH berlaku sebagai fasilitator dapat memberikan penilaian dan rekomendasi sebagai bagian dari pelayanan teknis KPH kepada para pihak.
2. Dalam hal tugas dan fungsi KPH dalam pelaksanaan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan hutan, penyusunan rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen RPHJP dan RPHJPd serta pelaksanaan pembangunan pengelolaan berbasis resor (*resort based management*), peran KPH untuk Perencanaan dan Pengelolaan Hutan sangat menentukan.
3. Ruang lingkup rinci dari masing-masing tema pada Seri Buku Manual ini akan disajikan pada masing-masing Manual.

# **BAB II**

## **DAFTAR TEMA MANUAL**

Buku Seri Manual ini, terdiri dari 16 (enam belas) tema yaitu:

### **A. Perencanaan Hutan Pada KPH**

1. Manual Inventarisasi Hutan dan Inventarisasi Sosial Ekonomi Masyarakat di KPH

Berisikan pedoman atau prosedur kerja pengumpulan data dan pengolahan data tentang sumber daya hutan, potensi kekayaan hutan dan lingkungannya serta interaksi dan tingkat ketergantungan masyarakat sekitar hutan dengan kawasan hutan.

2. Manual Penataan Hutan di KPH

Berisikan pedoman atau prosedur kerja menata atau membagi ruang kawasan hutan (menjadi blok dan/atau petak) dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan.

3. Manual Pembukaan Wilayah Hutan di KPH

Berisikan pedoman atau prosedur kerja penyiapan sarana dan prasarana hutan, antara lain jalan hutan, jembatan di dalam hutan,



Tempat Penimbunan Kayu (TPK) di dalam hutan termasuk bangunan yang ada di dalamnya.

4. Manual Pengorganisasian Pengelolaan KPH

Berisikan pedoman atau prosedur kerja membangun struktur organisasi yang efisien, kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap pemegang jabatan, untuk mempermudah dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam penyelesaian suatu pekerjaan, serta pengawasan dan pengendalian.

5. Manual Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH

Berisikan pedoman atau prosedur kerja penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) sesuai dengan azas kelestarian hutan, untuk satu jangka 10 tahun guna menjamin kelestarian hutan dan kelestarian pemanfaatan hutan.

6. Manual Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPH

Berisikan pedoman atau prosedur kerja penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) tahunan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sesuai tata waktu.

7. Manual Penyusunan Anggaran KPH

Berisikan pedoman atau prosedur kerja penyusunan anggaran kegiatan tahunan berdasarkan skala prioritas kegiatan dan RPHJP.

8. Manual Integrasi Rencana Pengelolaan Hutan di KPH dengan Rencana Pembangunan Daerah

Berisikan pedoman atau prosedur kerja integrasi kegiatan pegurusan hutan oleh KPH sebagaimana yang telah direncanakan pada RPHJP dan RPHJPd ke dalam bagian dari Rencana Pembangunan Daerah sesuai pembagian urusan bidang kehutanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

9. Manual Identifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH) Di Wilayah KPH

Berisikan pedoman atau prosedur kerja identifikasi PTKH sebagai salah satu upaya memahami potensi konflik tenurial dalam kawasan hutan yang merupakan wilayah KPH sehingga dapat membantu dalam proses penyelesaian melalui penataan kawasan hutan dalam rangka penguatan kawasan hutan.

## **B. Pengelolaan Hutan Pada KPH**

### 10. Manual Pembinaan Hutan di KPH

Berisikan pedoman atau prosedur kerja persiapan benih, persiapan lapangan, penaburan, penyapihan, pemeliharaan, pemupukan, seleksi bibit, pengangkutan, pengendalian hama penyakit dan pencatatan persemaian, pembuatan tanaman dan pemeliharaan, pengelolaan hama penyakit serta perlindungan dari kebakaran.

### 11. Manual Pemanenan Kayu di KPH

Berisikan pedoman atau prosedur kerja produksi kayu meliputi persiapan penebangan, penebangan, pengukuran pengujian, penyaradan dan pengangkutan.

### 12. Manual Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu di KPH

Berisikan pedoman atau prosedur kerja perencanaan, persiapan, pelaksanaan pemanenan, sortasi mutu produksi HHBK.

### 13. Manual Pengujian HHBK, Pemasaran Produk dan Usaha Lain di KPH

Berisikan pedoman atau prosedur kerja pengukuran dan pengujian mutu HHBK, Pemasaran dan pemanfaatan hasil hutan lainnya.

### 14. Manual Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan di KPH

Berisikan pedoman atau prosedur kerja pembentukan kelembagaan/kelompok, penguatan kelompok/lembaga,

merencanakan pengelolaan hutan, akses permodalan dan pemasaran produk serta pendampingan masyarakat dan perhutanan sosial.

15. Manual Pengelolaan Lingkungan dan Konservasi SDH di KPH

Berisikan pedoman atau prosedur kerja pengelolaan lingkungan, yang terdiri dari pengelolaan kawasan perlindungan setempat, survey keanekaragaman hayati dan pengukuran erosi.

16. Manual Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di KPH

Berisikan pedoman atau prosedur kerja rehabilitasi hutan dan reklamasi serta teknik Konservasi Tanah dan Air yang berada di dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

# **BAB III**

## **PENUTUP**

Seri Buku Manual ini menjadi bagian dari Output Pelaksanaan Komponen 1 Proyek II FIP khususnya kegiatan “Penyiapan Metodologi Dan Panduan Teknis Untuk Perencanaan Management KPH Dalam Rangka Pengembangan Kelembagaan Dan Peningkatan Kapasitas KPH”. Dalam hal terdapat perubahan kewenangan, tugas dan fungsi KPH, Manual ini juga dapat membantu tugas KPH dimaksud khususnya sebagai fasilitator, pembimbing teknis, pembina, pengawas, evaluator, koordinator, pengendali atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan dan implementasi kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pada Akhirnya, dengan Seri Buku Manual ini menjadi salah satu upaya dalam menyediakan pengetahuan khususnya untuk organisasi KPH agar dalam menjalankan peran pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan hutan di KPH tetap menjamin kelestarian hutan dalam rangka sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.



PROYEK II FOREST INVESTMENT PROGRAM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN